

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari peneliti. Data penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian, jurnal, volume	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Asri Rahmawati Gunawan/2019/ Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi/ Jurnal Administrasi Publik/Vol. 1 No. 2 ¹	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan grand teori dari Heroepoetri yang memiliki 5 dimensi.	Peran Dinas Perhubungan belum berjalan secara maksimal karena belum bertindak tegas kepada pemilik angkutan umum perkotaan yang menetapkan tarif tidak sesuai peraturan, yang tidak melakukan uji KIR dan belum ada tindakan yang tegas terhadap supir ojeg	- Lokasi penelitian - Menggunakan 5 dimensi Heroepoetri	- Membahas pengelolaan angkutan umum - Subjek adalah Dinas Perhubungan setempat - Penelitian kualitatif

¹ Asri Rahmawati Gunawan, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, Bandung, 2019.

			pangkalan yang menghalangi adanya pemerataan akses transportasi		
2.	Lula Aulia Nabilah/2022/ Pengelolaan Pemerintahan dalam Mengatasi Kemacetan Melalui Penyediaan Transportasi Publik (Studi pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2020)/ Jurnal Administrasi Pemerintahan/ Vol.2 No.1 ²	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Dishub Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam bidang transportasi karena belum memenuhi semua aspek pengelolaan pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus pada salah satu jenis transportasi kota saja 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas pengelolaan angkutan umum - Subjek adalah Dinas Perhubungan setempat - Penelitian kualitatif
3.	Madi Ramadhan/2023/ Pengelolaan dalam Penyediaan Transportasi Publik Pemerintah DKI Jakarta dengan Konsep Dynamic	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah DKI Jakarta erus mengalami perubahan secara dinamis dan menciptakan pelayanan moda transportasi publik yang mudah dan terintegritas. Berbagai inovasi sudah dilakukan,	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Fokus pada konsep <i>Dynamic Governance</i> - Subjek adalah Pemerintah kota setempat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas pengelolaan angkutan umum - Penelitian kualitatif

² Lula Aulia Nabilah, *Pengelolaan Pemerintahan dalam Mengatasi Kemacetan Melalui Penyediaan Transportasi Publik (Studi pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2020)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1, Bandung, 2022.

	Governance/ Journal of Social Contemplati va/ Vol.1 No.1 ³		namun tentunya masih banyak hal yang perlu dibenahi.		
4.	Nia Gusti Lestari/2017/ Pengelolaan Sistem Transportasi Oleh Dinas Perhubunga n Kota pekanbaru Tahun 2013- 2015/ Journal of Social Contemplati va/ Vol.1 No.1 ⁴	Penelitian ini mengguna kan metode penelitian deskriptif dengan pendekata n kualitatif.	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem transportasi di Pekanbaru yang memiliki berbagai perencanaan diantaranya Pengaturan Trayek Angkutan dengan mengubah jalur trayek pada angkutan umum jenis Oplet dan Bus Kota. Kemudian dalam Pengaturan Trayek dengan perencanaan merubah keseluruhan trayek-trayek pada Oplet dan Bus Kota belum dapat terlaksana. Dikarenakan kurang kerja sama dan koordinasi antar pihak Dishub sebagai Pemerintah dan Organda sebagai pihak Swasta.	- Lokasi penelitian	- Membahas pengelolaa n angkutan umum - Subjek adalah Dinas Perhubung an setempat - Penelitian kualitatif

Sumber: jurnal penelitian internet

³ Madi Ramadhan, *Pengelolaan dalam Penyediaan Transportasi Publik Pemerintah DKI Jakarta dengan Konsep Dynamic Governance*, Journal of Social Contemplativa, Volume 1 Nomor 1, Jakarta, 2023.

⁴ Nia Gusti Lestari, *Pengelolaan Sistem Transportasi Oleh Dinas Perhubungan Kota pekanbaru Tahun 2013-2015*, Journal of Social Contemplativa, Volume 1 Nomor 1, Jakarta, 2023.

B. Landasan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Secara umum, pengertian pengelolaan adalah suatu seni dalam ilmu dan organisasi, seperti perencanaan, pembangunan organisasi dan organisasinya, pergerakan, pengendalian, atau pengawasan. Dapat juga diartikan bahwa pengelolaan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain serta kelompok tertentu dan masyarakat secara luas. Secara etimologis, pengelolaan adalah seni melaksanakan dan mengelola., pengelolaan juga dipandang sebagai ilmu yang mengajarkan proses pencapaian tujuan dalam suatu organisasi dan merupakan usaha bersama dari beberapa orang dalam organisasi tersebut.⁵⁾

Menurut Afandi, pengelolaan adalah proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan

⁵ Hasibuan, *Manajemen SDM, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 41.

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif.⁶⁾

Pengelolaan merupakan kumpulan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi dilakukan pada struktur akuntabilitas serta mengambil keputusan tentang aktivitas strategis pada pengelolaan beberapa sumber daya yang ingin dicapai.⁷⁾ Pengelolaan berhubungan dengan pengendalian, arahan dan aturan. Istilah pengelolaan digunakan pada kasus kehidupan nyata seringkali disertai dengan asumsi tentang bagaimana pengelolaan dapat dicapai, dengan kata lain, konsep yang digunakan ini dipengaruhi konteks tertentu. Pengelolaan diartikan sebagai pelaksanaan wewenang untuk mengontrol, mengatur dan mengarahkan. Pengelolaan adalah sebuah proses dalam suatu organisasi yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada organisasi tersebut.⁸⁾

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

⁶⁾ Afandi, *Manajemen Sumberdaya Manusia (Teori, Konsep, dan Indikator)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2019, h. 1.

⁷⁾ Richardus Eko Indrajit, *Pengelolaan Organisasi dan Pengelolaan Teknologi Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 85.

⁸⁾ Hartono Jogiyanto, *Sistem Pengelolaan Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, h. 45.

b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

1) Fungsi pengelolaan

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.⁹

Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho¹⁰, yaitu:

a) *Planning* (perencanaan)

Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik;

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana

⁹ L. Tihanyi, A.E. Ellstrand, C.M. Daily, Pelletier S., M. Villeneuve, State Ownership and Political Connections, *Journal of Management*, Volume 45 Nomor 6, pp. 2293-2321, 2014.

¹⁰ R. Lloyd & W. Aho, *The Four Function of Management: An Essential Guide to Management Principles*, Digital Pressbooks, Kansas, 2020.

prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja;

- c) *Directing, Activating, Leading* (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

- d) *Controlling* (mengendalikan)

Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, *Standard Operational Procedure* (SOP), sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

2) Tujuan pengelolaan

Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) yang diharapkan. Tujuan pengelolaan dapat dianggap tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan 8 indikator pengelolaan yang baik (*good governance*), yaitu: berdasarkan hukum (*rule of law*), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan, konsensus, partisipatif, efisien dan efektif.¹¹⁾

Setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
- b) Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan, kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
- c) Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal.

¹¹ A. Florentina & C. Vasile Lotos, Good Governance and the Rule of Law-Major Pillars of Economic Efficiency, *Journal of Public Administration, Finance and Law*, Volume 13, 2018. 123–133.

Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah pengelolaan sebagai berikut:

- a) Menyusun strategi;
- b) Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan daftar personil;
- c) Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil & kualitas, dan batasan waktu;
- d) Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi;
- e) Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP);
- f) Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas;
- g) Membuat kriteria penilaian;
- h) Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi;

2. Angkutan Umum

a. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan/transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis, barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Angkutan/transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan alat pengangkut, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep angkutan/transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).

Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang sering digunakan masyarakat secara bersama-sama dan membayar tarif yang sudah ditentukan. Jasa angkutan umum memiliki pengguna yang bervariasi seperti mahasiswa, pelajar, pekerja, ibu rumah tangga dan lain-lain.¹²⁾ Berbagai macam transportasi publik antara lain becak, ojek, bus umum, kapal feri, kereta api dan pesawat. Layanan transportasi publik bisa berupa angkutan penumpang seperti bus, angkutan umum, taksi, travel dan yang melayani angkutan barang seperti truk.

b. Kriteria Angkutan Umum

Sarana angkutan umum harus memenuhi kriteria pelayanan publik. Menurut Ramadani, mengatakan transportasi publik harus memiliki tiga kriteria dasar yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Kenyamanan menjadi aspek yang harus bisa dirasakan penumpang yang menggunakan layanan jasa transportasi. Hal itu sangat diraskan apabila sarana transportasi tersebut dilengkapi fasilitas yang memberikan rasa

¹²⁾ Kurnia Ramadani, *Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Antar Kota PT. Zona Sikumbang Jaya Rute Bukittinggi – Painan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, h. 10.

nyaman kepada penumpang. Pendingin udara adalah salah satunya.¹³⁾

Aspek kedua yaitu keamanan, keamanan yang dirasakan oleh penumpang selama menggunakan sarana pelayanan transportasi. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keamanan adalah sistem tertutup, yaitu dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang merupakan bukan penumpang. Contoh kasus pada bus yang di dalamnya termasuk terminal atau halte yang hanya diakses oleh penumpang yang sudah memesan tiket bus. Pada sistem naik turun penumpang, untuk menjaga keamanan, penumpang diharapkan naik dan turun hanya pada terminal atau halte yang telah ditentukan dan penumpang tidak dapat naik turun pada tempat selain terminal atau halte resmi. Dengan adanya sistem tertutup ini memberikan rasa aman terhadap penumpang dari ancaman, pencopetan, pencurian, perampokan, dan insiden lainnya yang mengancam keamanan dan keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa transportasi.

Aspek ketiga, yaitu kecepatan dimana terpenuhinya waktu untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat terpenuhi apabila sarana transportasi didukung dengan pra sarana khusus, seperti rel khusus yang

¹³⁾ Kurnia Ramadani, *Tinjauan ...*, h. 9.

dimiliki oleh kereta api. Dengan melihat prasarana kereta api, maka pada transportasi bus dapat diterapkan dengan menyediakan jalur khusus biasa disebut *busway*.

c. Jenis Layanan Dalam angkutan Umum

Pengangkutan orang dengan pengangkutan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dengan:¹⁴⁾

1) Trayek tetap dan teratur

Trayek tetap dan teratur Adalah pelayanan angkutan umum yang dilakukan dalam jaringan trayek secara teratur dengan jadwal tetap atau tanpa terjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang. Jaringan trayek ditetapkan dengan memperhatikan:

- a) Kebutuhan angkutan.
- b) Kelas jalan yang sama.
- c) Tingkat pelayanan.
- d) Jenis pelayanan jalan.
- e) Rencana umum tata ruang.
- f) Kelestarian lingkungan.

¹⁴⁾ Adnin Arafah, *Evaluasi Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Kasus)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 16.

2) Tidak dalam trayek

Pengangkutan orang dengan angkutan umum tidak dalam trayek dari:

- a) Pengangkutan dengan menggunakan taksi.
- b) Pengangkutan dengan cara sewa.
- c) Pengangkutan untuk keperluan wisata.
- d) Angkutan penumpang khusus.

Faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan dapat dikelompokkan menjadi dua¹⁵, yaitu:

1) Faktor Jalan

Lebar lajur, kebebasan lateral, bahu jalan, ada tidaknya median, kondisi permukaan jalan, alignment, kelandaian jalan, trotoar, dan lain-lain.

2) Faktor Lalu Lintas

Komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur, dan gangguan lalu lintas, adanya kendaraan tidak bermotor, gangguan samping, dan lain-lain.

d. Jaringan Trayek

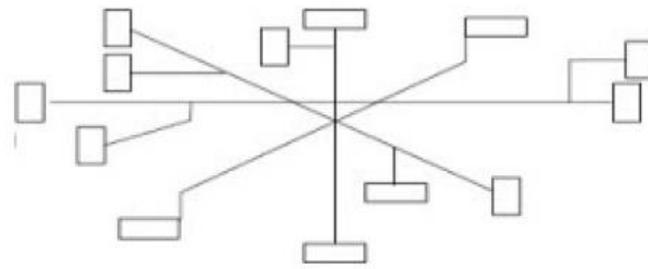
Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang. Pola jaringan trayek

¹⁵⁾ Adnin Arafah, *Evaluasi ...*, h. 16.

menurut Giannopoulus yang dikutip oleh Adnin Arafah yang ditunjukkan pada gambar berikut.¹⁶⁾

1) Pola radial

Pada pola radial, seluruh atau hampir seluruh jalur utama membentuk jari-jari dari pusat ke daerah pinggiran kota. memutar pusat kota atau berhenti di pusat kota. Pola ini diilustrasikan pada gambar berikut.

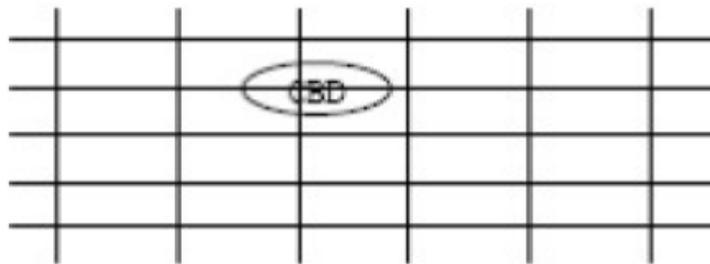


Gambar 1. Jaringan trayek pola radial

2) Pola orthogonal/grid

Pola orthogonal/grid ditandai dengan lintasan-lintasan yang membentuk grid (kisi-kisi) sebagian menuju ke pusat kota dan sebagian lainnya tidak menuju pusat kota. Tujuan utama pola ini memberikan pelayanan yang sama untuk semua bagian kota. Pola ini diilustrasikan pada gambar berikut.

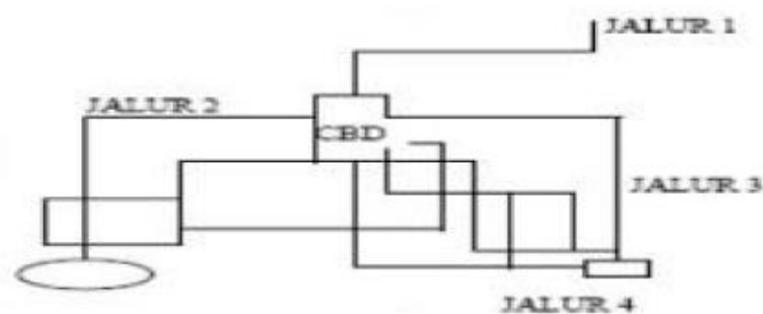
¹⁶⁾ Adnin Arafah, *Evaluasi ...*, h. 17-20.



Gambar 2. Jaringan trayek pola orthogonal/grid

3) Pola radial bersilang

Pola radial bersilang bertujuan untuk mempertahankan karakteristik pola grid dan tetap mendapatkan keuntungan pola radial dengan saling menyalang lintasan dan menyediakan titik-titik tambahan dimana lintasan saling bertemu seperti di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat pendidikan. Pola ini diilustrasikan pada gambar berikut.

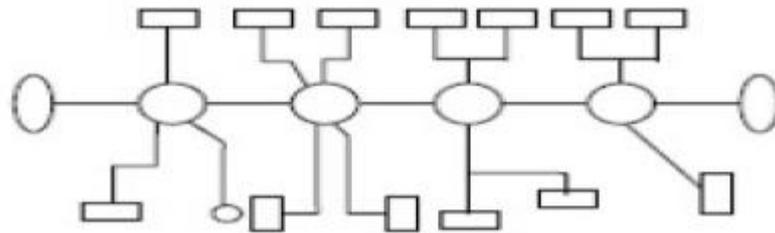


Gambar 3. Jaringan trayek pola radial bersilang

4) Pola jalur utama dengan feeder

“feeder” adalah jalan-jalan yang menuju jalur utama. Jalan arteri melayani koridor utama yang berbentuk linier

atau memanjang karena kondisi topografi dan pola jaringan jalan, atau perkembangan kota berbentuk linier dan lain-lain. Untuk itu dipilih pelayanan jenis feeder berupa lintasan menuju jalan utama dari pada membuat lintasan angkutan kota sepanjang jalan untuk mencapai tujuan. Sedangkan keuntungan dapat meningkatkan pelayanan jalur utama. Pola diilustrasikan pada gambar berikut.

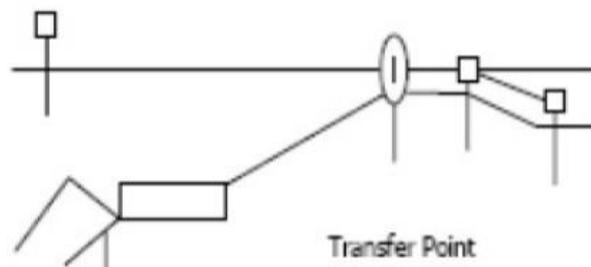


Gambar 4. Jaringan trayek pola jalur utama dengan *feeder*

5) Pola time transfer *network*

Untuk pola time transfer network perlu perencanaan sangat cermat, karna membutuhkan koordinasi antara perencanaan rute dan penjadwalan. Keuntungan pola ini adalah penumpang tidak perlu kepusat kota untuk berindah atau menunggu lama, karena seluruh lintasan melayani titik-titik perpindahan penumpang dengan frekuensi, jadwal kedatangan dan keberangkatan yang sama, sehingga angkutan kota dijadwalkan saling bertemu atau bersimpangan selama waktu tertentu untuk penumpang

berpindah kendaraan. Pola ini diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Jaringan trayek pola time transfer *network*

Faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan jaringan trayek adalah sebagai berikut:

1) Pola tata guna lahan

Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan aksesibilitas yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek angkutan umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga lokasi-lokasi yang potensial menjadi tujuan berpergian diusahakan menjadi prioritas pelayanan.

2) Pola pergerakan penumpang angkutan umum

Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti pergerakan penumpang angkutan sehingga tercipta pergerakan yang lebih efisien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi

pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum yang diminimumkan.

3) Kepadatan penduduk

Salah satu faktor yang menjadi prioritas pelayanan angkutan umum adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan sedekat mungkin menjangkau wilayah itu.

4) Daerah pelayanan

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pemerataan wilayah perkotaan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.

5) Karakteristik jaringan jalan

Kondisi jaringan jalan akan menentukan pola pelayanan trayek angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalan.¹⁷⁾

¹⁷⁾ Adnin Arafah, *Evaluasi Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Kasus)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 20.

3. Pengelolaan Angkutan/Transportasi Umum

Pengelolaan lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengatutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas suatu moda transportasi. Pengelolaan lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Peningkatan kapasitas jalan, persimpangan, dan / jaringan jalan.
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi pemakai jalan.¹⁸⁾

Menurut Zulfikar Sani bahwasanya pengelolaan lalu lintas pada angkutan/transportasi umum terbagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.¹⁹⁾

- a. Perencanaan.

Proses perencanaan dalam sistem transportasi.

¹⁸⁾ Zulfikar Sani, *Transportasi ...*, h. 38.

¹⁹⁾ Zulfikar Sani, *Transportasi ...*, h. 39-41.

- 1) Menginventarisasi dan mengevaluasi tingkat pelayanan (*level of service*) lalu lintas. Menginventarisasi di maksudkan mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan termasuk persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan kecepatan dan keselamatan.
- 2) Menetapkan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dengan memperhatikan: Rencana umum jaringan transportasi jalan: kegunaan, kapasitas, dan karakteristik jalan: kelas jalan: karakteristik lalu lintas. Aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi.
- 3) Menetapkan pemecahan permasalahan lalu lintas.
- 4) Menyusun rencana dan program pelaksanaan implementasinya. Maksud rencana dan implementasi meliputi: penentuan tingkatan pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan: usulan aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan: usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, markah jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan: usulan kegiatan atau tindakan

baik untuk keperluan penyusunan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

b. Pengaturan

Pengaturan pada jalan merupakan suatu kegiatan untuk berlalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam hal ini penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan perintah bagi pemakai jalan yang tertuang dalam rambu-rambu markah.

c. Pengawasan.

Pengawasan ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana peraturan yang ada apakah dilaksanakan dengan baik oleh pengendara.

- 1) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksana kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan tersebut untuk ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan koreksi yang telah dilakukan oleh pelanggar tersebut.
- 2) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

d. Pengendalian

Pada transportasi pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas kepada pengemudi.

- 1) Pemberian arahan atau petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan pengelolaan lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya, serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang ditetapkan.
- 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Sementara itu, pengelolaan lalu lintas angkutan/transportasi umum menurut Lloyd & Aho terbagi menjadi empat hal yang utama²⁰⁾, antara lain sebagai berikut:

²⁰⁾ R. Lloyd & W. Aho, *The Four Function of Management: An Essential Guide to Management Principles*, Digital Pressbooks, Kansas, 2020.

a. *Planning* (perencanaan)

Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja.

c. *Directing, Activating, Leading* (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

d. *Controlling* (mengendalikan)

Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, *Standard Operational*

Procedure (SOP), sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan pendapat Lloyd & Aho dalam pembahasan pengelolaan angkutan/transportasi umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unit pelaksana di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan pelayanan umum dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan otonomi daerah.

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan pelayanan prima di bidang perhubungan yang aman, nyaman dan berkeselamatan serta berkepastian hukum.

b. Misi

- 1) Indeks kepuasan masyarakat (kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana, sosialisasi dan survei) peningkatan pengelolaan dan rekayasa perhubungan.

- 2) Wahana Tata Nugraha (WTN).
- 3) Menurunnya angka terjadinya kecelakaan lalu lintas.²¹⁾

²¹⁾ Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, <https://dinhub.bojonegorokab.go.id/menu/detail/3/VisidanMisi>, diakses pada 24 Mei 2024.